



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**Bekerja Bersama
Merangkul Semua**

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan sebagai tindak lanjut tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, serta memuat rumusan visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan prioritas serta indikator kinerja. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Demikian kiranya RENSTRA ini disusun, saran serta pendapat menuju ke arah perbaikan sangat diharapkan agar RENSTRA ini dapat memenuhi fungsinya secara optimal, sehingga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Buntok, 22 Desember 2025



Pt. KEPALA BPKAD
KABUPATEN BARITO SELATAN

ALI SADIKIN, SE.,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19690505 200501 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD	7
2.1.2 Sumber Daya BPKAD	10
2.1.3 Sarana dan Prasarana	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	12
2.1.4 Sasaran Pelayanan BPKAD	14
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	16
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.2.2 Isu Strategis	17
2.3 Rumusan Perubahan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi BPKAD	17
2.4 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal Yang Diperlukan Untuk Lebih Efektif dan Efisien	18
2.5 Penentuan isu-isu strategis	19
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 Tujuan Rentra	23
3.2 Sasaran Rentra	26
3.3 Strategis	27
3.4 Arah Kebijakan	27
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN	29
4.1 Uraian Program	29
4.2 Uraian Kegiatan	30
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif	31
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah	62
4.5 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	64
BAB V. PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini melibatkan analisis situasi, penetapan visi dan misi, serta penyusunan program kerja yang terukur dan realistis.

Mengingat struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan ke dalam RPD Kabupaten Barito Selatan untuk setiap Tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Selatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Selatan. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari Presiden ”*Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili*

Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”
(UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpajakan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan beban Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2006;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun

- 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
 32. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20;
 33. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pengelolaan Belanja Daerah. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan/ pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Barito Selatan dari Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.1.2 Sumber Daya
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan
- 2.1.4 Sasaran Pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan
 - 2.2.2 Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra
- 3.2 Sasaran Renstra
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikatr Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan
- 4.5. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BPKAD

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Bidang Aset Daerah

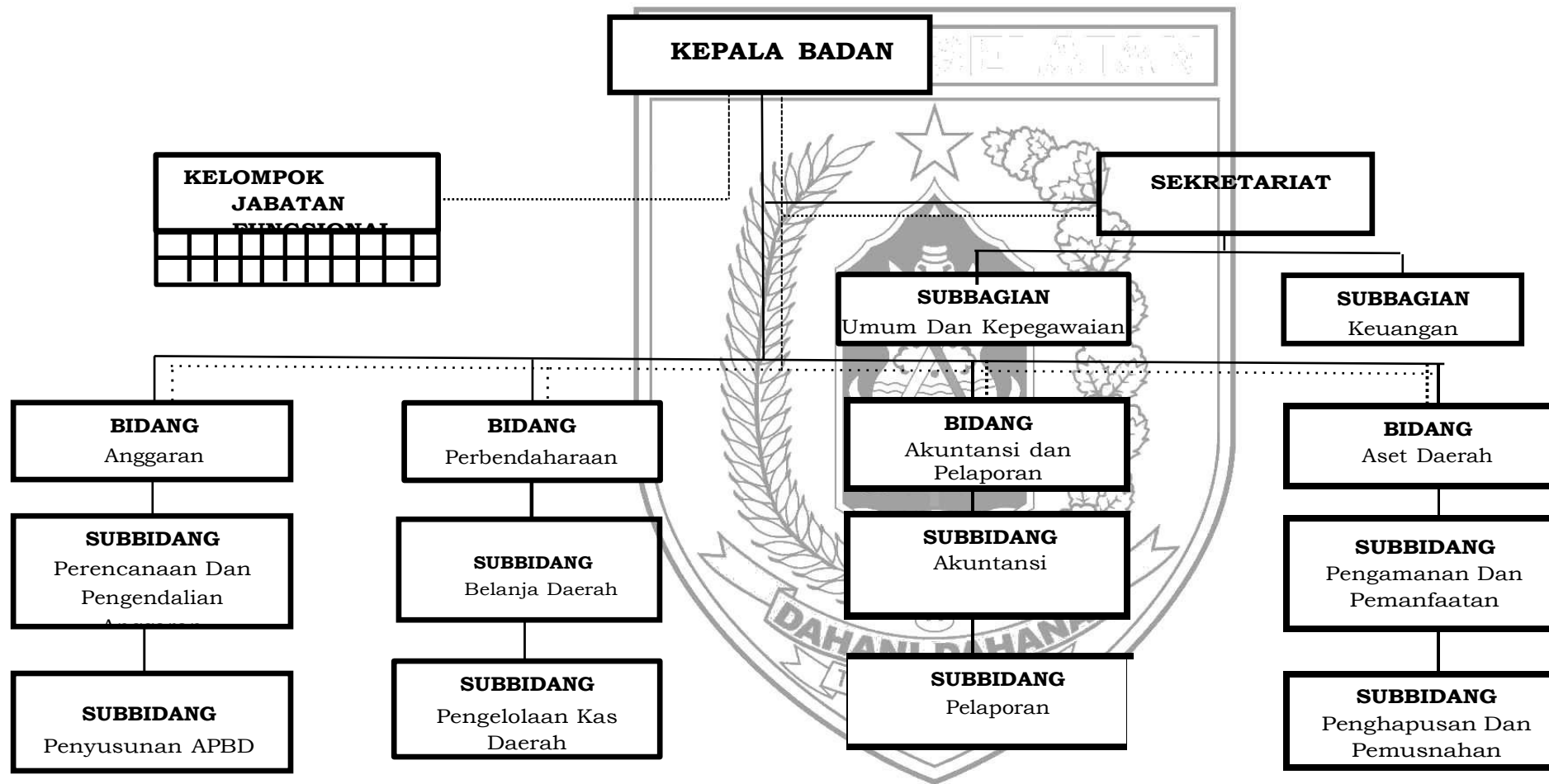
Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan

- b. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Belanja Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Akuntansi; dan
 - b. Subbidang Pelaporan.
- 5. Bidang Aset Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan
 - b. Subbidang Penghapusan dan Pemusnahan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi Administratif

2.1.2 Sumber Daya BPKAD

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah aparatur sebanyak 101 yang terdiri dari 35 orang PNS, 27 orang PPPK dan 39 orang Tekon.

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2025

No	Unit Kerja	Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Subbidang	JFT	JFU	P3K	Tekon	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	1	4	8	22	38
3	Bidang Anggaran	-	-	1	1	-	3	6	5	16
4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	2	-	3	4	4	14
5	Bidang Aklap	-	-	1	2	1	2	2	4	12
6	Bidang Aset	-	-	1	2	1	5	7	2	18
	Jumlah	1	1	4	9	3	17	27	37	99

Adapun komposisi dan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Jumlah dan Komposisi dan Kebutuhan Pegawai pada BPKAD Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	Jumlah Kondisi SDM saat ini		Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		JUMLAH
		PNS	P3K	PNS	P3K	
1	Sekretariat	9	8	12	7	36
2	Bidang Anggaran	5	6	10	5	26
3	Bidang Perbendaharaan	6	4	8	0	18
4	Bidang Aklap	6	2	9	0	17
5	Bidang Aset	9	7	8	0	24
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	35	27	47	12	121

Keadaan Pegawai menurut golongan jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel. 2.1.4
Jumlah dan Komposisi
PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan golongan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS				GOLONGAN PPPK		JUMLAH
		IV	III	II	I	V	IX	
1	Kepala	1	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	6	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	-	5	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	-	6	-	-	1	3	10
5	Bidang Aklap	1	4	-	-	1	2	8
6	Bidang Aset	1	6	1	-	3	3	14
7	Pejabat Fungsional	-	3	-	-	-	-	3
	Jumlah	4	30	1	-	14	13	62

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1.5
Jumlah dan Komposisi
PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN PNS						PENDIDIKAN PPPK		JUMLAH
		S-2	S-1	D III	SLTA	SLTP	SD	S-1	SLTA	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	3	-	3	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	1	1	2	1	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	2	3	1	-	-	-	1	3	10
5	Bidang Aklap	1	3	-	1	-	-	1	2	8
6	Bidang Aset	1	4	1	2	-	-	3	3	14
7	Pejabat Fungsional	1	2	-	-	-	-			3
	Jumlah	8	16	4	7	-	-	14	13	62

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPKAD menurut Diklat penjenjangan :

- a. ADUM : - Orang
- b. ADUMLA : - Orang
- c. SPAMA : - Orang
- d. SPAMEN : - Orang
- e. Diklat Pim Tk II : 1 Orang
- f. Diklat Pim Tk III : 3 Orang
- g. Diklat Pim Tk IV : 5 Orang

2.1.3 Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dalam Daftar Inventaris dibawah ini :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1.	Meja Kerja	106	Unit
2.	Kursi Kerja	231	Unit
3.	Lemari	231	Unit
4.	Laptop/Komputer	31	Unit
5.	Printer	126	Unit
6.	A.C Pendingin	55	Unit
7.	Gedung BPKAD	4	Unit

2.1.4 Kinerja Pelayanan BPKAD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). BPKAD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan aset yang efisien. Dalam Renstra, BPKAD menetapkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui evaluasi kinerja yang berkala, BPKAD dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja pelayanan BPKAD dalam Renstra tidak hanya berfokus pada pencapaian angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah (PDPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai perbedaan dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya dalam rekening belanja yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Perangkat Daerah (PD) lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan juga mengelola rekening-rekening belanja seperti Rekening Iuran Jaminan Kesehatan, Kematian, Kecelakaan yang melekat di Kegiatan Gaji dan tunjangan PNS, rekening bantuan sosial, rekening bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga dan belanja subsidi yang menyebabkan besarnya belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, dan apabila Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 2.1.3
Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Bidang Kerja pada BPKAD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	19	19	38
2	Bidang Anggaran	9	7	16
3	Bidang Perbendaharaan	5	9	14
4	Bidang Aklap	6	5	11
5	Bidang Aset	12	5	17
6	Pejabat Fungsional	2	1	3
	Jumlah	53	46	99

Tabel 2.1.3
Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Eselon pada BPKAD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	ESELON	Jenis Kelamin		JUMLAH
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	II b	1	0	1
		III a	1	0	1
		IV a	0	2	2
2	Bidang Anggaran	III b	1	0	1
		IV a	1	0	1
3	Bidang Perbendaharaan	III b	1	0	1
		VI a	0	2	2
4	Bidang Aklap	III b	1	0	1
		IV a	2	0	2
5	Bidang Aset	III b	1	0	1
		IV a	2	0	2
6	Pejabat Fungsional	IV a	2	1	3
	Jumlah		13	5	18

2.1.5 Sasaran Pelayanan BPKAD

Sasaran Pelayanan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, transparansi dalam laporan keuangan, serta optimalisasi aset daerah. BPKAD berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Beberapa sasaran spesifik yang ingin dicapai antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan sasaran-sasaran ini, BPKAD berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2025-2029 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini

dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun ke belakang.

No.	Kelemahan Faktor Internal	No.	Kekuatan Faktor Internal
1.	Kemampuan teknis	1.	Adanya Perda SOPD
2.	Standarisasi beban kerja	2.	Kualitas SDM aparatur
3.	Sarana prasarana kurang memadai	3.	Komitmen Aparatur yang Tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategis tahun ke depan dari mulai tahun 2025-2029.

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

No	Peluang Faktor Eksternal	No.	Tantangan Faktor Eksternal
1.	Peran BPKAD yang strategis	1.	Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional
2.	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat	2.	Masyarakat semakin kritis, informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, antara lain :

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
- b. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- d. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
- e. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
- f. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;
- h. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
- i. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

- j. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
- k. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- l. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
- m. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terbatas.

2.2.2 Isu Strategis

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan harus menyesuaikan visinya untuk Tahun 2025-2029 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) Penyusunan Anggaran yang Efektif, (2) Pelaksanaan Belanja yang Efisien (3) Pelaporan Keuangan yang Akurat (4) Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal (5) Pengendalian Internal yang Ketat.

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

3.3. RUMUSAN PERUBAHAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI BPKAD

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan

nilai Aparatur bersih yang diakibatkan oleh belanja daerah dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI

PLE

No.	Kekuatan (S)	No.	Peluang (O)
1	Kualitas SDM aparatur	1	Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan
2	Komitmen Aparatur yang tinggi	2	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat
No.	Kelemahan (W)	No.	Tantangan (T)
1	Kemampuan teknis	1	Globalisasi
2	fungsiional	2	Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa
3	Standarisasi beban kerja	3	Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
	Sarana prasarana yang kurang memadai		

3.4. RUMUSAN PERUBAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG DIPERLUKAN UNTUK LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAFE)

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobotx rating)	Prioritas
KEKUATAN					
1	Adanya perda SOPD	20	4	80	I
2	Kualitas sumber daya aparatur	15	4	60	II
3	Komitmen Aparatur yang Tinggi	15	3	45	III
KELEMAHAN					
1	Kemampuan teknis fungsiional	25	4	100	I
2	Standarisasi beban kerja	15	3	45	II
3	Sarana prasarana yang kurang memadai	10	2	20	III
Jumlah		100		350	

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda SOPD yang ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan

teknis fungsional, prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah komitmen Aparatur yang tinggi sedangkan sarana prasarana yang kurang memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobot x Rating)	Prioritas
PELUANG					
1	Peran BPKAD yang strategis	25	3	75	I
2	Kepercayaan pimpinan	20	3	60	II
3	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat	10	1	10	III
TANTANGAN					
1	Globalisasi	20	3	60	I
2	Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa	10	2	20	II
3	Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat	15	3	45	III
Jumlah		100		270	

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI - ASUMSI STRATEGIS

KAFI	Kekuatan (S) 1. Adanya perda SOPD; 2. Kualitas Sumber daya Aparatur; 3. Komitmen Aparatur yang tinggi.	Kelemahan (W) 1. Kemampuan Teknis Fungsional; 2. Standarisasi beban kerja; 3. Sarana Prasarana yang kurang memadai.
KAFE		
Peluang (O)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)

1. Peran BPKAD yang Strategis;	1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;	1. Tingkatkan volume Pendidikan fungsional di BPKAD;
2. Kepercayaan Pimpinan;	2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;	2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.
3. Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.	3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.	

Tantangan (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1. Globalisasi;	1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Perbedaan persepsi dalam membaca Peraturan dengan Pemeriksa;	2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait;	2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa
3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.	3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	3. Kerjasama dengan pihak ketiga

Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT diatas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut:

MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGI PILIHAN UNTUK MENCAPAI FKK

ASUMSI STRATEJIK	KETERKAITAN DENGAN											URUTAN PILIHAN STRATEGI
	VISI			MISI			NILAI-NILAI					
1	2			3			4					5
S-O :												
1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	41 (I)
2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	38 (IV)
3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.	3	3	3	2	3	4	2	4	3	4	2	33 (IX)
S-T :												
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40 (II)
2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dgn SOPD Terkait;	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	2	34 (VIII)
3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	4	3	3	3	4	4	1	2	4	4	4	36 (VI)
W-O :												
1. Tingkatkan Volume Pendidikan fungsional di BPKAD;	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	39 (III)

2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	3	35 (VII)
W-T :												
1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	40 (II)
2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa;	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	37 (V)
3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	4	4	3	4	3	3	1	3	2	3	2	32 (X)

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1-4), yaitu:

4 = Paling Terkait

3 = Terkait

2 = Kurang Terkait

1 = Tidak Terkait

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

FORMULASI TUJUAN

FKK (CFS)	CARA FORMULASI TUJUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kompetensi BPKAD 2. peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur 3. tingkatan volume pendidikan fungsional di BPKAD 4. peningkatan eksistensi BPKAD 5. meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dgn pemeriksa 6. meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan 7. meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat 8. meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dgn SKPD terkait 9. peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD 10. kerjasama dengan pihak ketiga
MISI	TUJUAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan SOPD yang akuntabel dan profesional 2. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan dan belanja daerah yang

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan	berdedikasi tinggi, bertanggung jawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah
---	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra

Dengan memperhatikan Sasaran Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5(lima) tahun. Visi Kepala Daerah mencerminkan arah pembangunan yang ingin dicapai selama masa jabatan tersebut. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian pelaksanaan program pembangunan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:



“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”

Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera

Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

2. Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing

Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara.

Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.

4. Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara

Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 **misi** pembangunan meliputi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadopsi Misi 2 **“Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”**.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan Kota Buntok adalah Tujuan 5: Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 **“Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”**. Adapun sasaran pembangunan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tujuan ke-5 yaitu antara lain **“Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan**

inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal”. Dapat dilihat pada table dibawah ini :

MISI	M2	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
TUJUAN	T5	Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: **”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**

Seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak punya niat menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pengelolaan keuangan yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan kedalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi.

Tujuan Strategi memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan, **”Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik”**.

3.2 Sasaran Renstra

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran Daerah RPJMD untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Inmendagri No.2 Tahun 2025 dan SE No. P.050/219/LP3-Bapp/V/2025 tentang Pedum Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 **”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”**.

3.3 Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti **“Meningkatkan kapasitas fiskal daerah”**.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik tanpa terlalu tergantung pada dana pusat, yang dapat dicapai melalui strategi seperti di antaranya penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah :

1. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

(Transparansi dan Akuntabilitas)

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar alokasi anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran;

(Cermat dalam Anggaran)

Pemerintah daerah perlu memeriksa anggaran dengan cermat untuk menghindari pemborosan dan mengalokasikan dana pada kegiatan yang memberikan manfaat berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

(Pelatihan dan Pendampingan)

Memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan public.

(Kepemimpinan Cerdas dan Kreatif)

Kebutuhan kepemimpinan daerah yang cerdas dan kreatif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial untuk membangun strategi peningkatan kapasitas fiskal yang efektif

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan, Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD. Arah kebijakan RPJMD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk Peningkatan dan penguatan kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sesuai dengan potensi daerah, peningkatan proporsi belanja program Pembangunan, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Program pembangunan daerah, diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program oleh masing-masing perangkat daerah (PD). Pelaksanaan program-program setiap PD bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Program perangkat daerah disusun untuk masa periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi masing-masing PD. Untuk menunjukkan sejauh mana capaian pembangunan dapat diraih, maka setiap program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja.

Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, selain ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara langsung, juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Program-program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk fungsi pelayanan PD kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, program tersebut mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
Sasaran	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal.

Mengacu pada Permendagri tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan program utama sesuai TUPOKSI dan juga program penunjang yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah semua aktivitas atau serangkaian pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kegiatan ini mencakup semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah.

Mengacu pada Permendagri tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan program dan Kegiatan sesuai TUPOKSI yaitu :

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

KEUANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penataan Organisasi

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Uraian sub kegiatan adalah deskripsi detail sebuah aktivitas yang merupakan bagian dari suatu program, dilengkapi dengan kinerja (apa yang ingin dicapai), indikator (ukuran keberhasilan), target (sasaran kuantitatif/kualitatif yang spesifik), dan pagu indikatif (estimasi alokasi anggaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui untuk kegiatan tersebut).

Kinerja penyelenggara bidang urusan renstra BPKAD merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggara bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dengan adanya renstra yang jelas, BPKAD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Tabel 6
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				333.279.874.261,00		333.279.874.261,00		341.415.501.191,00		342.362.893.891,00		346.605.696.199,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				229.280.729.901,00		229.280.729.901,00		229.280.729.901,00		229.280.729.901,00		229.280.729.901,00		
Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan BPKAD	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	98	98	229.280.729.901,00	98	229.280.729.901,00	98	229.280.729.901,00	98	229.280.729.901,00	98	229.280.729.901,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				430.127.250,00		430.127.250,00		430.127.250,00		430.127.250,00		430.127.250,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	430.127.250,00	0	430.127.250,00	0	430.127.250,00	0	430.127.250,00	0	430.127.250,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			

	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1											
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00	88.871.750,00		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00	87.345.550,00		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00	80.342.650,00		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00	90.210.000,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00	83.357.300,00		

5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				132.045.553.767,00		132.045.553.767,00		132.045.553.767,00		132.045.553.767,00		132.045.553.767,00		

Meningkatnya kualitas layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	36	132.045.553.767,00	36	132.045.553.767,00	36	132.045.553.767,00	36	132.045.553.767,00	36	132.045.553.767,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67	67		67		67		67		67			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				131.260.907.017,00		131.260.907.017,00		131.260.907.017,00		131.260.907.017,00		131.260.907.017,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67	67	131.260.907.017,00	67	131.260.907.017,00	67	131.260.907.017,00	67	131.260.907.017,00	67	131.260.907.017,00		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250.764.250,00		250.764.250,00		250.764.250,00		250.764.250,00		250.764.250,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	36	250.764.250,00	36	250.764.250,00	36	250.764.250,00	36	250.764.250,00	36	250.764.250,00		
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				233.352.600,00		233.352.600,00		233.352.600,00		233.352.600,00		233.352.600,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	233.352.600,00	1	233.352.600,00	1	233.352.600,00	1	233.352.600,00	1	233.352.600,00		
5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				300.529.900,00		300.529.900,00		300.529.900,00		300.529.900,00		300.529.900,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	300.529.900,00	1	300.529.900,00	1	300.529.900,00	1	300.529.900,00	1	300.529.900,00		
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				263.155.950,00		263.155.950,00		263.155.950,00		263.155.950,00		263.155.950,00		
Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	15	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				263.155.950,00		263.155.950,00		263.155.950,00		263.155.950,00		263.155.950,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	15	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00	15	263.155.950,00		
5.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				827.696.250,00		827.696.250,00		827.696.250,00		827.696.250,00		827.696.250,00		
Meningkatnya kualitas administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	827.696.250,00	1	827.696.250,00	1	827.696.250,00	1	827.696.250,00	1	827.696.250,00		
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				260.300.000,00		260.300.000,00		260.300.000,00		260.300.000,00		260.300.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	260.300.000,00	1	260.300.000,00	1	260.300.000,00	1	260.300.000,00	1	260.300.000,00		

5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				396.148.250,00		396.148.250,00		396.148.250,00		396.148.250,00		396.148.250,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	396.148.250,00	1	396.148.250,00	1	396.148.250,00	1	396.148.250,00	1	396.148.250,00		
5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				171.248.000,00		171.248.000,00		171.248.000,00		171.248.000,00		171.248.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	9	171.248.000,00	9	171.248.000,00	9	171.248.000,00	9	171.248.000,00	9	171.248.000,00		
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				943.571.234,00		943.571.234,00		943.571.234,00		943.571.234,00		943.571.234,00		
Terlaksananya laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	105	105	943.571.234,00	105	943.571.234,00	105	943.571.234,00	105	943.571.234,00	105	943.571.234,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	105	105		105		105		105		105			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	500	500		500		500		500		500			

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	103	103		103		103		103		103		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	15	15		15		15		15		15		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.064.000,00		44.064.000,00		44.064.000,00		44.064.000,00		44.064.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	500	500	44.064.000,00	500	44.064.000,00	500	44.064.000,00	500	44.064.000,00	500	44.064.000,00	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.157.500,00		91.157.500,00		91.157.500,00		91.157.500,00		91.157.500,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	105	105	91.157.500,00	105	91.157.500,00	105	91.157.500,00	105	91.157.500,00	105	91.157.500,00	
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				142.834.310,00		142.834.310,00		142.834.310,00		142.834.310,00		142.834.310,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	105	105	142.834.310,00	105	142.834.310,00	105	142.834.310,00	105	142.834.310,00	105	142.834.310,00	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.729.500,00		40.729.500,00		40.729.500,00		40.729.500,00		40.729.500,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	40.729.500,00	5	40.729.500,00	5	40.729.500,00	5	40.729.500,00	5	40.729.500,00	
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				346.056.000,00		346.056.000,00		346.056.000,00		346.056.000,00		346.056.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	346.056.000,00	36	346.056.000,00	36	346.056.000,00	36	346.056.000,00	36	346.056.000,00	
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				70.830.000,00		70.830.000,00		70.830.000,00		70.830.000,00		70.830.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	15	15	70.830.000,00	15	70.830.000,00	15	70.830.000,00	15	70.830.000,00	15	70.830.000,00	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				207.899.924,00		207.899.924,00		207.899.924,00		207.899.924,00		207.899.924,00	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	103	103	207.899.924,00	103	207.899.924,00	103	207.899.924,00	103	207.899.924,00	103	207.899.924,00		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.197.331.920,00		85.197.331.920,00		85.197.331.920,00		85.197.331.920,00		85.197.331.920,00		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	5	85.197.331.920,00	5	85.197.331.920,00	5	85.197.331.920,00	5	85.197.331.920,00	5	85.197.331.920,00		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.239.870.400,00		2.239.870.400,00		2.239.870.400,00		2.239.870.400,00		2.239.870.400,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	5	2.239.870.400,00	5	2.239.870.400,00	5	2.239.870.400,00	5	2.239.870.400,00	5	2.239.870.400,00		
5.02.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

5.02.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.415.000.000,00		81.415.000.000,00		81.415.000.000,00		81.415.000.000,00		81.415.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	81.415.000.000,00	3	81.415.000.000,00	3	81.415.000.000,00	3	81.415.000.000,00	3	81.415.000.000,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.542.461.520,00		1.542.461.520,00		1.542.461.520,00		1.542.461.520,00		1.542.461.520,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	1.542.461.520,00	3	1.542.461.520,00	3	1.542.461.520,00	3	1.542.461.520,00	3	1.542.461.520,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.887.552.110,00		1.887.552.110,00		1.887.552.110,00		1.887.552.110,00		1.887.552.110,00		
Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	1.887.552.110,00	3	1.887.552.110,00	3	1.887.552.110,00	3	1.887.552.110,00	3	1.887.552.110,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110.826.000,00		110.826.000,00		110.826.000,00		110.826.000,00		110.826.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	110.826.000,00	1	110.826.000,00	1	110.826.000,00	1	110.826.000,00	1	110.826.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.024.926.110,00		1.024.926.110,00		1.024.926.110,00		1.024.926.110,00		1.024.926.110,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	12	1.024.926.110,00	12	1.024.926.110,00	12	1.024.926.110,00	12	1.024.926.110,00	12	1.024.926.110,00		

Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				751.800.000,00		751.800.000,00		751.800.000,00		751.800.000,00		751.800.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	751.800.000,00	3	751.800.000,00	3	751.800.000,00	3	751.800.000,00	3	751.800.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.344.326.820,00		7.344.326.820,00		7.344.326.820,00		7.344.326.820,00		7.344.326.820,00		
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	7.344.326.820,00	0	7.344.326.820,00	0	7.344.326.820,00	0	7.344.326.820,00	0	7.344.326.820,00		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				657.752.400,00		657.752.400,00		657.752.400,00		657.752.400,00		657.752.400,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	657.752.400,00	2	657.752.400,00	2	657.752.400,00	2	657.752.400,00	2	657.752.400,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.798.087.420,00		5.798.087.420,00		5.798.087.420,00		5.798.087.420,00		5.798.087.420,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	5.798.087.420,00	4	5.798.087.420,00	4	5.798.087.420,00	4	5.798.087.420,00	4	5.798.087.420,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				688.807.000,00		688.807.000,00		688.807.000,00		688.807.000,00		688.807.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	688.807.000,00	20	688.807.000,00	20	688.807.000,00	20	688.807.000,00	20	688.807.000,00		
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				199.680.000,00		199.680.000,00		199.680.000,00		199.680.000,00		199.680.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	199.680.000,00	4	199.680.000,00	4	199.680.000,00	4	199.680.000,00	4	199.680.000,00		
5.02.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tanah														
Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi				341.414.600,00		341.414.600,00		341.414.600,00		341.414.600,00		341.414.600,00		
Tertindakannya Laporan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0	0	341.414.600,00	0	341.414.600,00	0	341.414.600,00	0	341.414.600,00	0	341.414.600,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
5.02.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				217.160.900,00		217.160.900,00		217.160.900,00		217.160.900,00		217.160.900,00		
Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	15	15	217.160.900,00	15	217.160.900,00	15	217.160.900,00	15	217.160.900,00	15	217.160.900,00		
5.02.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				124.253.700,00		124.253.700,00		124.253.700,00		124.253.700,00		124.253.700,00		
Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	15	15	124.253.700,00	15	124.253.700,00	15	124.253.700,00	15	124.253.700,00	15	124.253.700,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				102.192.313.340,00		102.192.313.340,00		110.147.257.168,00		110.895.898.456,00		114.920.074.211,00		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan BPKAD	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	1.499.526.300,00	Wajar Tanpa Pengecualian	1.499.526.300,00	Wajar Tanpa Pengecualian	1.676.063.472,00	Wajar Tanpa Pengecualian	1.701.417.164,00	Wajar Tanpa Pengecualian	1.923.497.155,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.392.684.800,00		1.392.684.800,00		1.531.953.280,00		1.685.148.608,00		1.853.663.469,00		
Tertindakannya Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

	dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)													
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.499.526.300,00		1.499.526.300,00		1.676.063.472,00		1.701.417.164,00		1.923.497.155,00		
Terlaksananya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	1.499.526.300,00	0	1.499.526.300,00	0	1.676.063.472,00	0	1.701.417.164,00	0	1.923.497.155,00		
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				263.625.450,00		263.625.450,00		288.845.046,00		292.467.002,00		324.192.715,00	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2	2	263.625.450,00	2	263.625.450,00	2	288.845.046,00	2	292.467.002,00	2	324.192.715,00	
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				449.688.900,00		449.688.900,00		474.908.496,00		478.530.452,00		510.256.165,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	8	8	449.688.900,00	8	449.688.900,00	8	474.908.496,00	8	478.530.452,00	8	510.256.165,00	
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				198.383.050,00		198.383.050,00		223.602.646,00		227.224.602,00		258.950.315,00	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3	3	198.383.050,00	3	198.383.050,00	3	223.602.646,00	3	227.224.602,00	3	258.950.315,00	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				333.754.150,00		333.754.150,00		358.973.746,00		362.595.702,00		394.321.415,00	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	35	35	333.754.150,00	35	333.754.150,00	35	358.973.746,00	35	362.595.702,00	35	394.321.415,00	

5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				133.416.650,00		133.416.650,00		159.636.246,00		162.258.202,00		193.983.915,00		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	133.416.650,00	6	133.416.650,00	6	159.636.246,00	6	162.258.202,00	6	193.983.915,00		
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				46.783.700,00		46.783.700,00		72.003.296,00		75.625.252,00		107.350.965,00		
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	46.783.700,00	1	46.783.700,00	1	72.003.296,00	1	75.625.252,00	1	107.350.965,00		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				73.874.400,00		73.874.400,00		98.093.996,00		102.715.952,00		134.441.665,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	2	73.874.400,00	2	73.874.400,00	2	98.093.996,00	2	102.715.952,00	2	134.441.665,00		

5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				96.678.143.000,00		96.678.143.000,00		104.055.085.252,00		104.336.762.004,00		107.653.085.839,00		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tertindakannya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0			
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertindakannya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Meningkatnya tata kelola anggaran BPKAD	Persentase Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan yang ditetapkan (%)	89	89	2.621.959.240,00	89	2.621.959.240,00	89	2.884.155.164,00	90	3.172.570.680,00	90	3.489.827.748,00		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.621.959.240,00		2.621.959.240,00		2.884.155.164,00		3.172.570.680,00		3.489.827.748,00		
Tertindakannya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1	2.621.959.240,00	1	2.621.959.240,00	1	2.884.155.164,00	1	3.172.570.680,00	1	3.489.827.748,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			

	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				96.300.000,00		96.300.000,00		122.519.592,00		176.580.736,00		208.306.442,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	96.300.000,00	2	96.300.000,00	2	122.519.592,00	2	176.580.736,00	2	208.306.442,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				125.473.250,00		125.473.250,00		151.692.842,00		180.534.394,00		212.260.100,00		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	35	35	125.473.250,00	35	125.473.250,00	35	151.692.842,00	35	180.534.394,00	35	212.260.100,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				108.538.000,00		108.538.000,00		134.757.592,00		163.599.144,00		195.324.850,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	35	35	108.538.000,00	35	108.538.000,00	35	134.757.592,00	35	163.599.144,00	35	195.324.850,00		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				293.428.250,00		293.428.250,00		319.647.842,00		348.489.394,00		380.215.100,00		
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3	3	293.428.250,00	3	293.428.250,00	3	319.647.842,00	3	348.489.394,00	3	380.215.100,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				161.908.800,00		161.908.800,00		188.128.392,00		216.969.944,00		248.695.650,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	6	6	161.908.800,00	6	161.908.800,00	6	188.128.392,00	6	216.969.944,00	6	248.695.650,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				322.495.500,00		322.495.500,00		348.715.092,00		377.556.644,00		409.282.350,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	1	1	322.495.500,00	1	322.495.500,00	1	348.715.092,00	1	377.556.644,00	1	409.282.350,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				338.157.500,00		338.157.500,00		364.377.092,00		393.218.644,00		424.944.350,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	1	1	338.157.500,00	1	338.157.500,00	1	364.377.092,00	1	393.218.644,00	1	424.944.350,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				147.686.940,00		147.686.940,00		173.906.532,00		202.748.084,00		234.473.791,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1	147.686.940,00	1	147.686.940,00	1	173.906.532,00	1	202.748.084,00	1	234.473.791,00		

5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				278.721.000,00		278.721.000,00		304.940.592,00		333.782.144,00		365.507.850,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	1	278.721.000,00	1	278.721.000,00	1	304.940.592,00	1	333.782.144,00	1	365.507.850,00		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				749.250.000,00		749.250.000,00		775.469.596,00		779.091.552,00		810.817.265,00		
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	3	3	749.250.000,00	3	749.250.000,00	3	775.469.596,00	3	779.091.552,00	3	810.817.265,00		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan BPKAD	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	85	85	98.070.827.800,00	85	98.070.827.800,00	85	105.587.038.532,00	90	106.021.910.612,00	90	109.506.749.308,00		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				0		0		0		0		0		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.392.684.800,00		1.392.684.800,00		1.531.953.280,00		1.685.148.608,00		1.853.663.469,00		
Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12	61.160.000,00	12	61.160.000,00	12	67.276.000,00	12	74.003.600,00	12	81.403.961,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				61.160.000,00		61.160.000,00		67.276.000,00		74.003.600,00		81.403.961,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12	61.160.000,00	12	61.160.000,00	12	67.276.000,00	12	74.003.600,00	12	81.403.961,00		

Terlaksananya Laporan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				0		0		0		0		0		
Tercapainya Target Persentase Penurunan SILPA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	0	0	1.331.524.800,00	0	1.331.524.800,00	0	1.464.677.280,00	0	1.611.145.008,00	0	1.772.259.508,00		
Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				0		0		0		0		0		
Tercapainya Target Persentase Penurunan SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	36	36	1.331.524.800,00	36	1.331.524.800,00	36	1.464.677.280,00	36	1.611.145.008,00	36	1.772.259.508,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	105	105		105		105		105		105			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				0		0		0		0		0		
Tercapainya Target Persentase Penurunan SILPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	70	70	1.331.524.800,00	70	1.331.524.800,00	70	1.464.677.280,00	70	1.611.145.008,00	70	1.772.259.508,00		
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				0		0		0		0		0		
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				379.631.400,00		379.631.400,00		417.594.540,00		459.353.994,00		505.289.393,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	36	36	379.631.400,00	36	379.631.400,00	36	417.594.540,00	36	459.353.994,00	36	505.289.393,00		
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				10.169.550,00		10.169.550,00		11.186.505,00		12.305.155,50		13.535.671,05		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	105	105	10.169.550,00	105	10.169.550,00	105	11.186.505,00	105	12.305.155,50	105	13.535.671,05		
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				78.309.600,00		78.309.600,00		86.140.560,00		94.754.616,00		104.230.077,20		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	36	36	78.309.600,00	36	78.309.600,00	36	86.140.560,00	36	94.754.616,00	36	104.230.077,20		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				56.602.000,00		56.602.000,00		62.262.200,00		68.488.420,00		75.337.262,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	36	36	56.602.000,00	36	56.602.000,00	36	62.262.200,00	36	68.488.420,00	36	75.337.262,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				35.512.000,00		35.512.000,00		39.063.200,00		42.969.520,00		47.266.472,00		
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	36	36	35.512.000,00	36	35.512.000,00	36	39.063.200,00	36	42.969.520,00	36	47.266.472,00		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				122.046.200,00		122.046.200,00		134.250.820,00		147.675.902,00		162.443.492,20		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1	1	122.046.200,00	1	122.046.200,00	1	134.250.820,00	1	147.675.902,00	1	162.443.492,20		

5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				110.141.200,00		110.141.200,00		121.155.320,00		133.270.852,00		146.597.937,20		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	110.141.200,00	1	110.141.200,00	1	121.155.320,00	1	133.270.852,00	1	146.597.937,20		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				539.112.850,00		539.112.850,00		593.024.135,00		652.326.548,50		717.559.203,35		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	70	70	539.112.850,00	70	539.112.850,00	70	593.024.135,00	70	652.326.548,50	70	717.559.203,35		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				96.678.143.000,00		96.678.143.000,00		104.055.085.252,00		104.336.762.004,00		107.653.085.839,00		
Terlaksananya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	96.678.143.000,00	0	96.678.143.000,00	0	104.055.085.252,00	0	104.336.762.004,00	0	107.653.085.839,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.525.219.596,00		2.528.841.552,00		2.560.567.265,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.525.219.596,00	1	2.528.841.552,00	1	2.560.567.265,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				79.178.143.000,00		79.178.143.000,00		79.178.143.000,00		79.206.984.552,00		79.238.710.265,00		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1	79.178.143.000,00	1	79.178.143.000,00	1	79.178.143.000,00	1	79.206.984.552,00	1	79.238.710.265,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		22.351.722.656,00		22.600.935.900,00		25.853.808.309,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	22.351.722.656,00	1	22.600.935.900,00	1	25.853.808.309,00		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	(Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0			
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.806.831.020,00		1.806.831.020,00		1.987.514.122,00		2.186.265.534,00		2.404.892.087,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah BPKAD	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	85	85	1.806.831.020,00	85	1.806.831.020,00	85	1.987.514.122,00	90	2.186.265.534,00	90	2.404.892.087,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.806.831.020,00		1.806.831.020,00		1.987.514.122,00		2.186.265.534,00		2.404.892.087,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	36	36	1.806.831.020,00	36	1.806.831.020,00	36	1.987.514.122,00	36	2.186.265.534,00	36	2.404.892.087,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0			

	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	31	31		31		31		31		31		
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				314.466.647,00		314.466.647,00		334.542.548,00		356.626.038,00		380.917.877,00	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	314.466.647,00	1	314.466.647,00	1	334.542.548,00	1	356.626.038,00	1	380.917.877,00	
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				200.229.047,00		200.229.047,00		220.304.948,00		242.388.438,00		266.680.277,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	31	31	200.229.047,00	31	200.229.047,00	31	220.304.948,00	31	242.388.438,00	31	266.680.277,00	
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				391.413.197,00		391.413.197,00		411.489.098,00		433.572.588,00		457.864.427,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12	391.413.197,00	12	391.413.197,00	12	411.489.098,00	12	433.572.588,00	12	457.864.427,00	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				186.855.247,00		186.855.247,00		206.931.148,00		229.014.638,00		253.306.477,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	186.855.247,00	1	186.855.247,00	1	206.931.148,00	1	229.014.638,00	1	253.306.477,00	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				142.509.417,00		142.509.417,00		162.585.318,00		184.668.808,00		208.960.647,00	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	36	36	142.509.417,00	36	142.509.417,00	36	162.585.318,00	36	184.668.808,00	36	208.960.647,00	

	Milik Daerah (Laporan)												
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				176.229.417,00		176.229.417,00		196.305.318,00		218.388.808,00		242.680.647,00	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	36	36	176.229.417,00	36	176.229.417,00	36	196.305.318,00	36	218.388.808,00	36	242.680.647,00	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				169.791.947,00		169.791.947,00		189.867.848,00		211.951.338,00		236.243.177,00	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	169.791.947,00	1	169.791.947,00	1	189.867.848,00	1	211.951.338,00	1	236.243.177,00	
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				92.112.547,00		92.112.547,00		112.188.448,00		134.271.938,00		158.563.777,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	92.112.547,00	1	92.112.547,00	1	112.188.448,00	1	134.271.938,00	1	158.563.777,00	
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				133.223.554,00		133.223.554,00		153.299.448,00		175.382.940,00		199.674.781,00	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	35	35	133.223.554,00	35	133.223.554,00	35	153.299.448,00	35	175.382.940,00	35	199.674.781,00	
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan

Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah mewujudkan tata Kelola Pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran BPKAD kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD bisa dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 6.2

Tabel 6.2

Penetapan Target dan Pagu Indikatif BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026-2030

VISI : Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara																
MISI 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.																
TUJUAN : Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan																
SASARAN : Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.																
Kode		Program	Indikator Outcome	Satuan Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
Urusan	Bidang Urusan					Program	2026		2027		2028		2029		2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	02		KEUANGAN	Opini BPK Atas Laporan Keuangan												
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	8,89	8,50	1.932.610.940,00	7,50	1.932.610.940,00	7,00	2.089.928.496,00	6,50	2.262.977.804,00	6,00	2.453.332.048,00
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00	40,00	97.367.491.300	40,00	97.367.491.300	40,00	104.849.311.920	40,00	105.246.354.880	40,00	108.689.581.539
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	28,66	28,90	1.314.375.200,00	29,00	1.314.375.200,00	30,00	1.445.812.720,00	31,00	1.590.393.992,00	32,00	1.749.433.391,80
				Persentase Penurunan SILPA	%	6,09	6,05	78.309.600,00	6,00	78.309.600,00	5,15	86.140.560,00	5,09	94.754.616,00	5,00	104.230.077,20
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100,00	1.499.526.300,00	100	1.499.526.300,00	100	1.676.063.472,00	100	1.701.417.164,00	100	1.923.497.155,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	21,90	22,00	2.660.354.532,00	23,00	2.926.389.985,20	24,00	3.219.028.983,72	25,00	3.540.931.882,09	26,00	3.895.025.070,30
6	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
6	01	03		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas	-	1,00	229.156.476.201	2,00	229.156.476.201	2,00	229.156.476.201	3,00	229.156.476.201	3,00	229.156.476.201
				Nilai SAKIP	Kriteria	B	B	124.253.700	B	124.253.700	B	124.253.700	B	124.253.700	B	124.253.700

4.5. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BPKAD merupakan perangkat daerah dengan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bukan penyelenggara urusan pemerintahan wajib maupun pilihan.

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, IKK hanya melekat pada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan. Dengan demikian, BPKAD hanya memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator teknis sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 disusun guna sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPKAD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Renstra BPKAD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2025-2029, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 83 sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan.

Rencana strategik yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.

Buntok, 22 Desember 2025

Plt, KEPALA BPKAD
KABUPATEN BARITO SELATAN



ALI SADIKIN, SE.,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19690505 200501 1 026